

A watercolor painting of four women in traditional Indonesian attire, possibly a wayang or shadow puppet style. They are depicted from the chest up, looking downwards. The woman on the far left has a red dot on her forehead and wears a yellow and orange garment. The woman next to her wears a blue garment. The woman in the center wears a green and yellow garment. The woman on the far right wears a pink and purple garment. The background is a soft, abstract wash of colors including yellow, orange, and light blue.

**Demokrasi
Tumbak Cucukan
(*Sukophantes*)**

A. SETYO WIBOWO

Sejak Pilpres 2014, rezim demokrasi telah membelah warga negara menjadi dua golongan yang biasa disebut *Kampret* dan *Cebong*. Yang masuk dalam kedua golongan ini mulai dari rakyat jelata sampai tingkat elite parpol bahkan intelektual.

Kedua golongan ini berada saling melaporkan. Di Yunani abad keempat SM, pembusukan demokrasi terjadi saat mekanisme kontrol kesetaraan berpendapat (*isegoria*) dijarah para pengadu (*sukophantes*).

Kampret-Cebong adalah *golongan* yang uniknya masing-masing memiliki anggota dari suku, ras, dan agama yang sama. Di kalangan *Cebong* ada orang Jawa, Batak, Papua, pribumi, non-pribumi, Islam, Protestan, Katolik, Hindhu, Buddha, dan Kepercayaan. Di kalangan *Kampret* pun sama. Dalam terminologi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), demokrasi kita sudah maju melampaui SAR, tetapi masih mandeg di tingkat *antar golongan*.

Bagi golongan *Cebong*, manusia utama di Indonesia adalah Jokowi. Sebaliknya, Prabowo serba buruk. Sementara bagi golongan *Kampret*, Prabowo adalah penyelamat Indonesia, sehingga apa pun yang jahat disematkan kepada Jokowi.

Kalau *Cebong* tersesat masuk di hutan tempat *Kampret* bergelantungan, ia tiba-tiba berada di “dunia lain” yang cara berpikrnya dibolak-balik: yang waras jadi edan, yang edan malah menyebut diri berakal sehat, di mana kata dianggap data, dan data pun mengalami mutasi genetik. Kita tidak tahan dengan para *Kampret* yang bersih bergelantungan di awang-awang tetapi penuh bau pesing kotoran di bawahnya.

Sebaliknya, kalau *Kampret* yang tercebur di kolam *Cebong* yang penuh berhimpitan, ia tiba-tiba sesak napas, kehilangan kebebasan, tidak bisa berpikir jernih karena semua terasa penuh, sistematis, masif dan terstruktur serta berbau konspiratif. Seperti tenggelam di kolam para pemuja penguasa, habitatnya pekat berlumpur penuh intrik dan kepentingan.

Orang menjadi pusing menyaksikan dua planet berbeda yang memiliki orbit masing-masing. Golongan

mana yang benar? Kalau kita berharap menemukan pegangan dengan kembali ke data survei para ahli *polling* yang tentunya rajin dan setia pada data keras, di situ pun kita kembali ke label yang sama. Bila ada sekian puluh survei memenangkan Jokowi, kita bilang itu pasti buatan *Cebong*. Sebaliknya, bila ada survei memprediksi kemenangan Prabowo dengan 54%, kita tertawa lebar karena bisa dipastikan itu survei *Kampret* (<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/17560941/survei-internal-bpn-prabowo-sandiaga-unggul-begini-cara-surveinya>).

Kepala terasa pening melayang di antara fakta dan fiksi. Realitas dianggap fiktif, sementara novel fiksi *Ghost Fleet* (2015) malah dianggap kebenaran.

Golonganisme menjadi makin parah akhir-akhir ini karena bangkitnya golongan lama bernama *Golput*. Tak mau direndahkan IQ-nya sekolam bersama *Cebong* yang goblok dan tak sudi dianggap sebagai *Kampret* berotak terbalik, kaum *Golput* meneriakkan bahwa mereka adalah alternatif paling *smart*. Meski kelihatannya hanya sedikit saja yang *Golput* ideologis (sisasisa pejuang melawan Orde Baru) atau *Golput* karena asli bingung tidak tahu apa-apa, kaum *Golput zaman now* tampaknya kebanyakan berisi *Cebong* yang hilang orientasi akibat terpengaruh laporan-laporan *hoax* selama ini. Eks *Cebong* ini *sebel* pada Jokowi, tetapi jijik kalau bergabung dengan *Kampret*. Atau, bisa jadi juga kalangan *Golput* ini berisi *Kampret* yang mulai pusing karena terlalu sering menaruh kepalanya di bawah. Namun ia malu *banget* kalau sampai ketahuan bahwa bentuknya mulai seperti *Cebong*. Itu makanya, *Golput* lantas menjustifikasi diri sebagai paling cerdas sendiri.

Platon: demokrasi dan tirani

Mengapa *Golonganisme* mengeras akhir-akhir ini? Kita bisa belajar dari kritik-kritik Platon atas demokrasi supaya terbantu untuk menatapnya dengan

lebih jujur. Menurut Platon, rezim demokrasi adalah rezim perpecahan. Secara logis, demokrasi berujung pada munculnya tirani.

Di mata Platon, demokrasi adalah rezim kebebasan dan kesetaraan. Ekses dari kebebasan yang *bablas* dan kesetaraan yang tak tahu batas malah memunculkan manusia-manusia tiranik.

Dalam rezim diktator, ada otoritas tunggal yang menyampaikan makna secara sewenang-wenang. Tidak ada perdebatan dan polemik karena makna dikuasai penguasa. Dalam rezim demokratis, warga negara bebas berbicara apa saja. *Agora* bernama *IT* (entah itu *Internet, Facebook, Twitter, WA Group*) adalah ajang *isegoria* (kesetaraan berbicara di ruang publik). Di *Agora IT*, orang elite atau rakyat jelata setara. Siapa saja bisa membuat opini apa pun karena semua dijamin setara dan dilindungi hukum.

Sekarang ini kita berhadapan dengan manusia demokratis yang mulai menjadi tiran-tiran kecil. Ia begitu percaya dengan kata-kata dan opininya sendiri. Berbekal kebebasan dan kesetaraan, apa pun yang ia pikirkan boleh dikatakan tanpa takut akan sangsi apa pun. Ia mengecilkan keugaharian (*moderation*) dan tidak peduli pada kehati-hatian. Sikap keras kepala dan omong *ngawur* justru dianggap jantan dan waras. Sebaliknya, orang yang omong terukur, toleran, dan hati-hati justru dianggap tidak *keren*, tidak *laku*, dan kehilangan akal sehat. Manusia tiranik hobinya menantang semua orang yang ia anggap melawan kehendaknya. Tanpa pandang bulu, bahkan terhadap presiden pun, manusia tiranik mengkritiknya *out of nothing*.

Dalam teks Isokrates mengeluhkan situasi pembusukan demokrasi Athena di abad IV SM. Isokrates ingat akan masa lalu yang indah, zaman keemasan demokrasi pada era Solon dan Cleisthenes, saat konstitusi mendidik warga menjadi lebih baik. Sebaliknya, pada eranya, konstitusi justru ditafsir sedemikian rupa oleh rakyat dan pemerintahan sehingga yang muncul adalah perilaku tiranik dan serba ganjil.

“Konstitusi yang dulu mereka buat, di zaman lampau, mengatur *polis* dengan baik, (dan) tidak sama lagi dengan konstitusi yang sekarang dipraktikkan sedemikian rupa – oleh mereka yang menerimanya atau oleh mereka yang menjadi pemimpin – sehingga pendidikan untuk para warga negara membuat mereka *menganggap kekacauan sebagai demokrasi*,



Mola, Pameran Tunggal Edited Clown, “Beautiful Harmony”, akrilik di atas kanvas, 200 x 150 cm, 2018

pelanggaran hukum sebagai kebebasan, omong apa saja sebagai kesetaraan, tidak ada lagi batasan, dan semua itu dilakukan dengan penuh bahagia. [Pada zaman dulu] Konstitusi membuat orang-orang membenci dan menghukum mereka yang bertingkah seperti itu, dan dengan cara itu, mereka berhasil membuat para warga negara lebih menahan diri dan lebih baik.” (Carine Doganis, 2006: 70)

Dalam analisis Platon tentang siklus rezim politik, demokrasi berujung pada tirani. Artinya, bila kajian psiko-politik Platon diterapkan pada level individu: manusia demokratis memang ujungnya adalah manusia tiranik. Psikologi individu, menurut Platon, berkaitan dengan situasi negara tempat ia hidup (Josiah Ober, professor *Political Science* di *Stanford University* dalam Olivia Goldhill [2018]). Individu demokratis berkaitan dengan rezim demokrasi yang



dihidupinya. Bila demokrasi berujung tirani, maka dalam rezim demokratis kita melihat munculnya manusia tiranik.

Manusia demokratis bertumbuh menjadi manusia yang merasa diri paling pintar, paling hebat, paling tahu, paling mumpuni, paling otoritatif. Ia menjulangkan dirinya sebagai lebih *smart*, lebih kritis dari lain-lainnya.

Manusia tiran seperti itu, dalam analisis Platon, adalah manusia yang akhirnya hanya akan dikelilingi kaum budak di sekitarnya. Kaum *yes-man*, kaum penjilat, kaum yang hanya bisa memberikan laporan menyenangkan. Ia menikmati jilatan-jilatan itu, dan selalu membutuhkannya.

Repotnya, si manusia tiran juga tahu bahwa ia berhadapan dengan sesama tiran lain yang hobinya sama (ingin dijilat). Dalam rezim demokrasi ia tidak

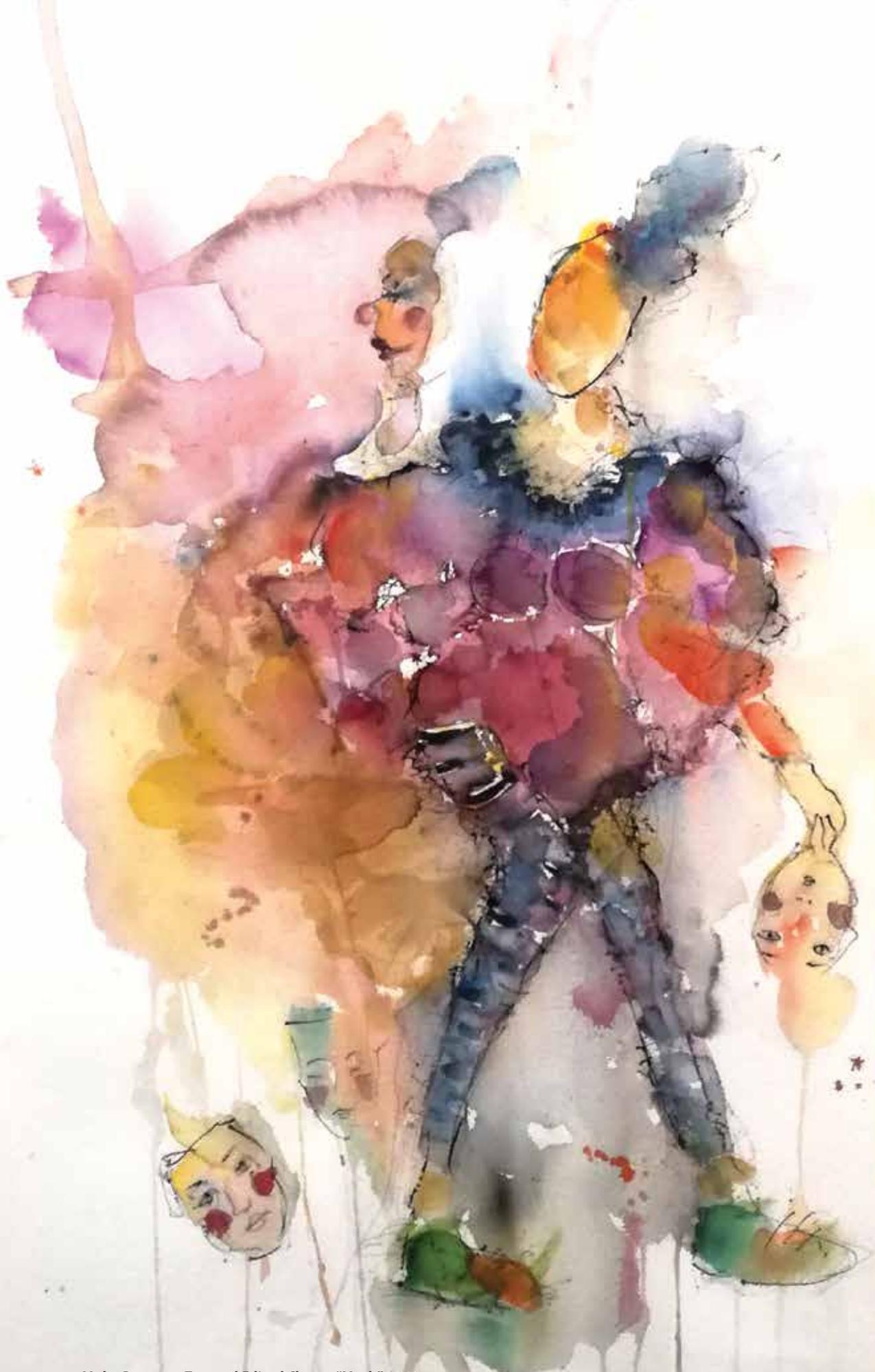
sendirian. Ia juga melihat banyak warga lainnya menjadi tiran seperti dirinya. Maka ia harus hidup dalam negosiasi permanen jilat-menjilat. Di satu sisi, ia senang dan bangga karena dijilat. Egonya melambung akibat jilatan pemujanya. Di sisi lain, ia paranoid karena berada di tengah tiran-tiran lainnya yang menuntut penjilatan yang sama. Ia tahu jilat-menjilat itu tidak mutu (karena ujung-ujungnya hanya uang), tetapi ia tidak bisa lepas karena terlanjur menikmati dan menginginkannya langgeng.

Manusia demokratis yang berevolusi menjadi manusia tiran terbelah jiwanya (mengalami *split personality*). Pada tataran sosial, situasi ini mengkhawatirkan karena selain benar-benar memecah belah masyarakat, kejiwaan yang terbelah membuatnya rentan bermimpi akan hadirnya Sang Tiran betulan.

Saat ini, Indonesia mengalami situasi keterbelahan. Golongan *Cebong* dan *Kampret* hidup dalam dunianya sendiri. *Golongan Putih* seakan tidak krasan di Indonesia dan ingin sebuah dunia lainnya. Negara ini terbelah-belah, dan ketiganya tidak berkomunikasi. Tiap pihak *mengadukan* pihak lainnya, meski tidak selalu dengan maksud jahat.

Kampret melaporkan kepada publik betapa negara ini dalam bahaya karena dijual kepada asing dan *aseng*. Demi menyelamatkan negara, para *Kampret* melaporkan kepada publik hadirnya jutaan warga negara asing (yang bukan hanya bekerja, tetapi juga akan ikut Pemilu karena memiliki KTP di sini). *Kampret* melaporkan kepada rakyat betapa rezim ini otoriter (mengkriminalisasi ulama, seniman, akademisi, dan lain-lain). *Kampret* melaporkan bahwa rezim ini korup, membebaskan utang luar biasa besar kepada anak cucu, rezim ini akan melarang orang beragama, akan menutupi masjid-masjid, melegalkan perzinahan.

Cebong melaporkan bahwa agenda kaum radikal ada di balik calon penguasa. *Cebong* melaporkan bahwa calon penguasa sudah *flirting* dengan kaum radikal sejak lama, *track record*-nya di bidang HAM menakutkan dan terkenal kejam. *Cebong* menunjukkan bahwa calon penguasa memiliki lahan ratusan ribu hektar, menyimpan uang di *tax haven*, tidak membayar adil pegawai-pegawainya, dan terang-terangan mengakui dengan bangga sebagai kroni Orde Baru yang telah ditumbangkan oleh para mahasiswa pada tahun 1998. *Cebong* mengibarkan bahaya kembalinya



Mola, Pameran Tunggal Edited Clown, "Mask", 2018

otoritarianisme Orba serta Suriahisasi Indonesia bila calon penguasa menang Pemilu.

Golput lantas melaporkan kepada khayalak ramai bagaimana para *Cebong* itu bodoh dan *Kampret* itu otaknya tidak normal. *Golput* bahkan secara ekstrem menuduh bahwa sistem Pemilu itu sendiri tidak tepat karena mereka hanya disodori pilihan yang tak mungkin mereka pilih. *Golput* sedemikian yakin bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah dunia mereka sehingga mereka memimpikan sebuah dunia putih entah di mana.

Cebong, *Kampret*, dan *Golput* adalah wujud tiran-tiran yang tak saling berkomunikasi. Mereka hidup dalam dunianya masing-masing. Masing-masing menjadi *tumbak cucukan*, melapor dan mengadu tentang musuhnya. Mengadu kepada siapa? Kata mereka: kami mengadu kepada “rakyat”. *Lha* rakyat ini siapa? Bukankah *Cebong*, *Kampret*, dan *Golput* adalah sama-sama rakyat?

Begitulah, kita sedang hidup pada era *tumbak cucukan*: saling mengadu dan menjelek-jelekkkan pihak lain, syukur-syukur bisa mengadu domba-domba yang terprovokasi oleh suara nyinyir nan tajam mereka.

“Dalam budaya Jawa, ada orang yang dikenal berwatak tumbak cucukan, karena berlidah sangat tajam bagaikan mata tombak. (...) Orang berwatak tumbak cucukan sering pula dilukiskan memiliki hati berbulu sangat gatal, lidah berbisa ganas dan bibir berduri runcing karena sering menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan penuh kebencian, suka mencaci-maki, menghina, mengadu domba, menyebarkan berita bohong atau memfitnah. (...) Orang berwatak tumbak cucukan bisa saja berseteru dengan orang yang berwatak sama. Maka jika suatu kelompok tumbak cucukan berseteru dengan kelompok tumbak cucukan lainnya, kampung bisa selalu gaduh karena pertengkaran mereka bisa sangat terbuka dan berlangsung berulang-ulang dalam waktu lama. (...) Di mata masyarakat beradab, orang berwatak tumbak cucukan adalah orang yang *tidak tahu atau tidak peduli etika pergaulan*. Dia juga tidak peduli atau tidak tahu malu. Karena itu, dia tidak mau diberi nasihat. Bahkan, orang yang mencoba memberinya nasihat akan dianggap musuhnya. (...) Jumlah orang yang berwatak tumbak cucukan selalu minoritas. *Namun, meskipun jumlahnya minoritas, [mereka] akan sering lebih populer karena suka bicara keras dan kasar memprovokasi pertengkaran di banyak*

tempat. (...) Dan, yang lebih sial lagi, *pada saat ini sosial media bisa berubah menjadi sarana penularan watak tumbak cucukan secara global*. Buktinya, sosial media semakin dipenuhi ujaran kebencian, adu domba, caci-maki, umpatan, berita bohong, atau fitnah.” (M. M. Bhoernomo berjudul “Watak Tumbak Cucukan”, Sabtu, 25 Februari 2017, pk. 13.30, di *TribunJateng.Com* (<http://jateng.tribunnews.com/2017/02/25/watak-tumbak-cucukan>).)

Siapa menanggung untung?

Belajar dari dua kasus Pilpres di Amerika (2016) dan Brazil (2018), situasi kebingungan dan keterpecahan dimanfaatkan dengan *ciamik* sehingga figur-figur aneh (ekstrem kanan) seperti Donald Trump dan Jair Bolsonaro terpilih menjadi presiden.

Untuk Indonesia, dengan keterbelahan seperti ini, siapakah yang akan mengambil untung? Kita belum tahu siapa yang akan menang besok April 2019, sehingga kita belum bisa mengatakan apakah nasib kita akan seperti Amerika dan Brazil.

Namun, saat ini, kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa para penanggung keuntungan dari situasi ini adalah kaum *sukophantes* (bhs. Inggris: *sycophants*).

Pada era penuh kebingungan, para Sofis dan *Sukophantes* mendapatkan lahan basahnya. Ketika rakyat bingung, saat argumen *mentok*, padahal demokrasi hanya bisa dimenangkan lewat kata-kata, kaum Sofis dan *Sukophantes* menjadi tumpuan harapan.

Dalam khazanah demokrasi pada era Yunani klasik: *sycophant* (dari bahasa Yunani *sukophantes*, *sukon/fig*/buah ara + *phanein*/ menunjukkan, artinya “orang yang menunjukkan buah ara”).

Menurut Kamus Yunani-Prancis *Le Grand Bailly* (edisi tahun 2000: 1816-1817), *sukophantes* secara literal merujuk pada orang yang *melaporkan* adanya pihak yang memperjualbelikan buah ara selundupan, atau orang yang *melaporkan* mereka yang mencuri buah ara terlarang (yang di area suci tertentu tidak boleh dipetik). *Sukophantes* dengan demikian merujuk pada orang yang profesinya adalah menjadi pelapor (dengan makna peyoratif). *Sukophantes* adalah pemberi laporan palsu, pengadu (orang yang mengadukan informasi palsu, *tumbak cucukan*), pemfitnah, penjilat (karena suka memberi informasi yang menyenangkan *boss*-nya), saksi palsu, pengkhianat, dan secara spesifik kadang

sukophantema adalah salah satu taktik argumen Sofisme.

Namun ahli lain berpendapat bahwa *sukophantes* (Latin: *sycophanta*) tidak berkaitan dengan pelapor buah ara selundupan! *Sukophantes* digambarkan dengan “menyelipkan ibu jari di antara dua jari lainnya”. Sebuah gerak isyarat yang kasar, seperti orang Jawa menyimbolkan persetubuhan. *Sukophantes* memang “menunjuk pada buah ara”, namun *sukon* juga secara metaforis berarti vulva, vagina (<https://www.etymonline.com/word/sycophant>).

Tafsir paling mutakhir percaya bahwa para politisi di Athena zaman itu secara publik menghindarkan diri dari gerak isyarat vulgar seperti ini. Tetapi, secara privat mereka ternyata justru menganjurkan para pengikutnya membuat *gesture* tersebut kepada lawan politiknya. Kaum *sukophantes* adalah *servile flatterer*, para penjilat yang siap mengadu (kepada *boss*) dan mengadukan musuhnya supaya terjadi adu domba.

Ruang demokrasi kita sekarang dipenuhi oleh para *tumbak cucukan*. *Golput* dan Golongan *Kampret* menuduh bahwa *Cebong* adalah pemuja kekuasaan dan anti pada calon penguasa baru. *Golput* dan *Cebong* menuduh *Kampret* sebagai pemuja calon penguasa yang anti pada penguasa sah. Golongan *Cebong* dan *Kampret* bersama-sama menuduh *Golput* sebagai makhluk paling aneh dan paling tidak bertanggung jawab di Indonesia ini.

Maksud baik bisa menjadi buruk

Perlombaan saling mengadu ini tentu bukannya tanpa kaitan dengan *keutamaan* dalam ruang publik. Demokrasi sejak Yunani Klasik ditentukan oleh partisipasi warga. Sejak era Solon, warga yang cinta pada demokrasi memiliki satu ketakutan: munculnya kembali tirani. Demi menunjukkan keutamaan sebagai wargalah akhirnya orang-orang suka saling mengadukan yang lain sebagai “calon tiran”.

Sejak awal demokrasi, ada aturan yang mengatakan bahwa “demi mencegah kembalinya tirani, maka siapa saja boleh melaporkan orang-orang yang berpotensi menjadi tiran.” Muncullah prosedur *ostracisme*: prosedur legal untuk melaporkan siapa saja yang tidak disukai karena dianggap berpotensi menjadi tiran. Bila jumlah *ostrakon* (potongan genteng tempat menuliskan nama yang hendak diadukan) mencukupi, maka si tertuduh akan menghadapi pengadilan yang risikonya adalah dibuang atau hukuman mati.

Sejak zaman Yunani, prosedur legal yang bagus dan baik yang menjadikan warga negara mempraktikkan keutamaan sebagai warga demokrasi, berubah menjadi sumber korupsi (pembusukan) demokrasi itu sendiri. *Ostracisme* memberi peluang besar bagi siapa saja untuk mengadukan siapa pun dengan alasan apa pun. Bila awalnya adalah demi “menjaga demokrasi dari bahaya tirani”, maka lama-kelamaan warga lupa. *Ostracisme* menjadi lahan subur kaum *sukophantes* untuk melaporkan siapa saja. Kepentingannya bukan lagi demi demokrasi, tetapi demi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan demokrasi, semisal, dendam dan ketidaksukaan pribadi, kepentingan golongan, atau uang.

Sebenarnya tidak perlu merujuk pada tradisi demokrasi, *tumbak cucukan* memiliki sejarah panjang. Sejak Adam mengadukan Hawa sebagai “penggoda” sehingga ia terpaksa makan buah terlarang, maka *tumbak cucukan* seolah sudah menjadi dosa asal manusia. Inkuisisi agama pada abad pertengahan adalah sistem yang mendasarkan diri pada laporan-laporan aduan dari siapa saja yang hendak melaporkan sesamanya. Pada episode Revolusi Prancis (1789-1792), *tumbak cucukan* bahkan dianggap sebagai aktivitas patriotik membela Revolusi dari anasir-anasir musuh (Carine Doganis, 2007: 18-19). Novel 1984 karya George Orwell dengan perih menggambarkan anak-anak kecil *tumbak cucukan* yang dianggap pahlawan oleh rezim *Big Brother*.

Pada rezim diktatorial, *tumbak cucukan* adalah spesialisasi intelijen, atau mereka yang direkrut sebagai intel pengawas negara. Namun di negara demokrasi, *tumbak cucukan* adalah ekspresi rasa memiliki yang sedemikian tinggi dari (sebagian) warga, entah secara jujur atau tak jujur, atas situasi negaranya secara umum. *Saking* semangatnya, para warga lantas menjadi *tumbak cucukan* satu sama lainnya, sehingga aparat memang lumayan *capek* memproses segala macam aduan dari berbagai pihak.

Kaum *sukophantes* bisa ditemukan di mana-mana. Mereka suka mengadu opini satu dengan opini lainnya demi bisa menjilat *boss* masing-masing dan supaya dijilati dengan rakusnya oleh para *follower*-nya. Mereka bisa ditemukan di kalangan politisi, pemuka agama, intelektual, pemegang acara *talk show*, wartawan (baik koran cetak maupun *online*), maupun para *influencer* di *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* yang *follower*-nya berkilo-kilo atau bermega-mega jumlahnya.

Dalam khazanah Yunani, kata kerja *sukophantein* (melaporkan) memiliki sinonim *diaballein* (memfitnah). Saat kebebasan berpendapat merosot menjadi ajang saling melaporkan dan mengadu, di sini opini dengan gampang berubah menjadi fitnah. Setiap pihak menebarkan gosip dan rumor yang membuat orang jadi ragu-ragu. Apa betul hanya gosip? Mengapa diulang-ulang dan terus menyebar? Jangan-jangan itu semua benar. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi merosot menjadi *rumorokrasi* (kekuasaan rumor/gosip). Orang tidak lagi percaya pada pengadilan, tetapi langsung menerapkan *justice d'opinion* (mengadili berdasarkan opini/gosip yang diterima). Saat rakyat bingung karena banyaknya rumor, argumen rasional tidak diperlukan lagi. Para *sukophantes* tinggal terus melaporkan satu sama lain “atas nama rakyat dan untuk rakyat”. Dengan begitu mereka menyentuh afeksi pemujanya, dan akhirnya mereka menjadi demagog (*demos-agogos*: pemimpin rakyat) (Carine Doganis, 2007: 106-111).

Demokrasi tak bisa menghindari fenomena *tumbak cucukan*. Apa yang tak terhindarkan bisa menjadi menakutkan bila mengakibatkan perpecahan permanen. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan bila ia terpecah belah. Tanpa diserang dari luar, bangsa yang pecah dengan sendirinya akan roboh.

Sistem Demokrasi tidak pernah dipilih karena dianggap ideal. Semua rezim politik buruk. Maukah kita mengadopsi Aristokrasi, Theokrasi (Khilafah), Oligarki, atau Tirani? Tentu kita tidak mau karena itu semua buruk. Demokrasi pun buruk. Kita merasakannya saat-saat ini. Namun dibandingkan semua rezim yang buruk, demokrasi paling *kurang* buruknya. Demokrasi dipilih karena ia adalah *lesser evil* (*minus malum*), sebuah keburukan yang lebih ringan daripada keburukan lainnya. Maksudnya? Dalam demokrasi sudah diatur bahwa penguasa hanya boleh berkuasa maksimal dua periode. Jadi? Ya sudah, tidak perlu paranoid. Jokowi berkuasa lagi pun paling lama 10 tahun. Tidak perlu melakukan revolusi memporakporandakan negara hanya gara-gara orang berkuasa lima tahun lagi. Apa susahnya menahan diri lima tahun lagi? *Toh* dengan sendirinya Jokowi nanti turun, dan Anda bisa memilih siapa yang paling *keren* nanti.

Manusia-manusia demokratis yang tiranik akan selalu ada. Selain pergantian penguasa secara teratur, ciri kedua demokrasi adalah tegaknya hukum yang berhak asasi manusia. Sejauh manusia-manusia tiranik tidak melanggar hukum, mereka harus dilindungi hukum. Namun bila terjadi tindakan kriminal, tentu hukum harus ditegakkan. Tetapi, adanya hukum tidak mencegah orang menjadi *tumbak cucukan*? Bukankah itu menyebarkan? Betul. Maka pertama, hukum harus *baik* dan ditegakkan, kemudian, kedua, akan sangat bagus kalau di pendidikan mulai diajarkan pentingnya sopan santun. Hanya pendidikan yang bisa memunculkan manusia yang beradab. Golongan *Cebong*, *Kampret*, dan *Putih* mungkin sudah terlalu tua untuk disuruh sekolah lagi. Namun kita masih punya harapan memperbaiki demokrasi bila kita bersedia menanamkan kembali pentingnya sopan santun yang beradab pada generasi muda. ●

Dr. A. Setyo Wibowo,
dosen STF Driyarkara, Jakarta

Red. Sebagian isi bahan ini telah didiskusikan di Tjikini Lima, 12 Maret 2019, yang diselenggarakan oleh Komunitas Pegiat Filsafat Jakarta, dengan tema “Keutamaan dan Ruang Publik”. Pembicara lainnya adalah Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

RUJUKAN

- Carine Doganis, “Secret et transparence dans la démocratie athénienne”, *Cités* no. 26, 2006/2, Prancis: PUF, hlm. 70 (<https://www.cairn.info/revue-cites-2006-2-page-69.htm>).
- Carine Doganis, *Aux Origines de la corruption: Démocratie et délation en Grèce ancienne*, Paris: PUF, 2007, hl. 18-19.
- Josiah Ober, professor *Political Science* di *Stanford University*, sebagaimana dikutip oleh Olivia Goldhill, dalam “Demagoguecracy: 2,400 years ago, Plato saw democracy would give rise to a tyrannical leader filled with ‘false and braggart words’”, *Quartz*, June 2, 2018 (<https://qz.com/1293998/2400-years-ago-plato-saw-democracy-would-give-rise-to-a-tyrannical-leader-filled-with-false-and-braggart-words/>)